

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah di Provinsi Banten

Julizar Idris¹, Jumanah², Alfatimatun Shiva Bella³, Diva Febiyanti⁴,

M. Angga Rahmadani⁵, Sritevi Wahyuni⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Institut Kemandirian Nusantara

¹julizarindris@iknus.ac.id, ²jumanah1011@gmail.com, ³alfatimatuns@gmail.com

⁴divafebiyanti12@gmail.com, ⁵anggarpgri@gmail.com, ⁶sriteviwahyuni08@gmail.com

Corresponding author: julizarindris@iknus.ac.id

Submitted: 13/05/2026; Revised: 25/06/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.551>

Abstract

This study examines sustainable tourism development policy as a strategy to strengthen the local economy in Banten Province. Tourism has become an important driver of regional economic growth because it generates multiplier effects through employment creation, micro, small, and medium enterprise development, local product demand, and regional revenue generation. However, increasing tourist mobility after the pandemic has also created several challenges, including visitor concentration in particular destinations, environmental pressure, limited waste management capacity, and unstable community income caused by seasonal tourism patterns. This study employed a qualitative descriptive approach through a literature review of 30 scientific articles, consisting of 20 international and 10 national publications, supported by relevant policy documents. The analysis focused on tourism governance, local economic development, environmental sustainability, and community participation. The findings show that sustainable tourism development requires a shift from fragmented destination management towards collaborative governance based on the Pentahelix approach and Community-Based Tourism. Strengthening local supply chains, supporting micro, small, and medium enterprises, diversifying tourism products, and improving digital tourism services are important strategies for extending visitor stays and maintaining demand throughout the year. In addition, integrating Sustainable Development Goals principles, environmental carrying capacity, transparent destination governance, and local regulatory support is essential to protect ecosystems and ensure a more equitable distribution of tourism benefits. The study concludes that integrated, participatory, and environmentally responsible tourism policy is necessary to strengthen regional economic resilience and sustainability in Banten Province.

Keywords: Banten Province; Community-Based Tourism; Local Economy; Sustainable Tourism; Tourism Governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai strategi penguatan ekonomi lokal di Provinsi Banten. Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena menghasilkan efek pengganda melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan permintaan terhadap produk lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, meningkatnya mobilitas wisatawan setelah pandemi juga menimbulkan sejumlah persoalan, seperti konsentrasi kunjungan pada destinasi tertentu, tekanan terhadap lingkungan, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan ketidakstabilan pendapatan masyarakat akibat pola kunjungan yang

bersifat musiman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap 30 artikel ilmiah, terdiri atas 20 artikel internasional dan 10 artikel nasional, yang didukung oleh dokumen kebijakan terkait. Analisis difokuskan pada tata kelola pariwisata, pengembangan ekonomi lokal, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan pergeseran dari pengelolaan destinasi yang terfragmentasi menuju tata kelola kolaboratif berbasis pendekatan Pentahelix dan Community-Based Tourism. Penguatan rantai pasok lokal, dukungan terhadap UMKM, diversifikasi produk wisata, serta pengembangan layanan pariwisata digital menjadi strategi penting untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan dan menjaga permintaan sepanjang tahun. Selain itu, integrasi prinsip Sustainable Development Goals, daya dukung lingkungan, tata kelola destinasi yang transparan, dan dukungan regulasi daerah diperlukan untuk menjaga ekosistem serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pariwisata yang terintegrasi, partisipatif, dan berwawasan lingkungan diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan keberlanjutan pariwisata di Provinsi Banten.

Kata kunci: Ekonomi Lokal; Pariwisata Berkelanjutan; Provinsi Banten; Tata Kelola Pariwisata; Wisata Berbasis Masyarakat.

Pendahuluan

Sektor pariwisata dalam konteks pembangunan global saat ini tidak hanya dianggap sebagai alat rekreasi sekunder atau sebagai industri tersier yang terpisah. Sektor ini telah mengalami perubahan struktural yang pesat dan telah bertransformasi menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi makro di berbagai negara (Liu et al., 2025; Capucho et al., 2025). Sebagai industri global yang melibatkan berbagai sektor, pariwisata memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan melalui fenomena yang disebut sebagai efek pengganda. Kebijakan yang diterapkan dalam sektor ini dapat mengaktifkan rantai pasok internasional, seperti pengadaan bahan baku makanan, kebutuhan perhotelan, serta layanan pendukung seperti event organizer, dan juga membuka pasar produk lokal ke jangkauan yang lebih luas. Di sisi lain, kebijakan yang efektif dapat memperkuat cadangan devisa suatu negara, menciptakan lapangan kerja yang memerlukan banyak tenaga kerja dari sektor akomodasi, pemandu, transportasi, hingga usaha kerajinan, dan sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kreatif di sekitar lokasi destinasi. Dampak yang terjadi sering kali tidak hanya berupa peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi baru yang lebih tahan terhadap perubahan selera konsumen jika dikelola dengan strategi yang adaptif.

Dalam konteks administrasi publik yang modern, keberhasilan dalam mengubah potensi sumber daya alam dan warisan budaya menjadi sumber kemandirian ekonomi serta peningkatan fiskal daerah telah dibuktikan secara nyata oleh berbagai wilayah yang menjadi perintis. Salah satu contohnya di dalam negeri adalah Kota Batu di Provinsi Jawa Timur, yang kini menjadi model (Yurisdiksi Percontohan) di tingkat nasional karena sukses dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan tersebut diraih melalui kebijakan pengelolaan pajak hotel, restoran, dan retribusi tempat wisata yang sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem digital (Soka et al., 2025). Integrasi sistem digital ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha melalui transparansi pelaporan, tetapi juga memperbaiki kualitas data kunjungan dan transaksi. Dengan adanya data yang lebih tepat, pemerintah daerah dapat merencanakan kapasitas layanan secara lebih proporsional, menekan kebocoran penerimaan, serta memastikan bahwa dampak ekonomi pariwisata lebih mudah diukur terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, model Kota Batu juga menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat sejalan dengan perbaikan kualitas destinasi, seperti melalui peningkatan standar kebersihan, sistem antrean layanan, dan peningkatan keamanan bagi wisatawan (Safitri et al., 2023)

Memasuki wilayah regional, Provinsi Banten memiliki posisi yang sangat penting dalam aspek geopolitik dan geo-ekonomi di Indonesia serta dalam jaringan pariwisata global. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Banten berperan sebagai pintu utama yang menghubungkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur logistik nasional antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dengan kekayaan modal lingkungan yang sangat berharga. Provinsi ini menawarkan ragam panorama wisata yang sangat beragam, mulai dari objek wisata pantai dan laut yang membentang dari Kawasan Anyer, Carita, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, hingga Pantai Sawarna. Di sisi lainnya, Banten memiliki kekayaan budaya dan pelestarian alam yang diakui di tingkat dunia, seperti situs warisan dunia Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang merupakan habitat terakhir Badak Jawa, serta Kawasan Adat Baduy (Kanekes) yang berpegang pada prinsip hidup harmonis dengan alam. Penggabungan aset alam dan budaya yang diakui secara global ini memberikan Banten kesempatan besar untuk mengembangkan paket wisata terpadu

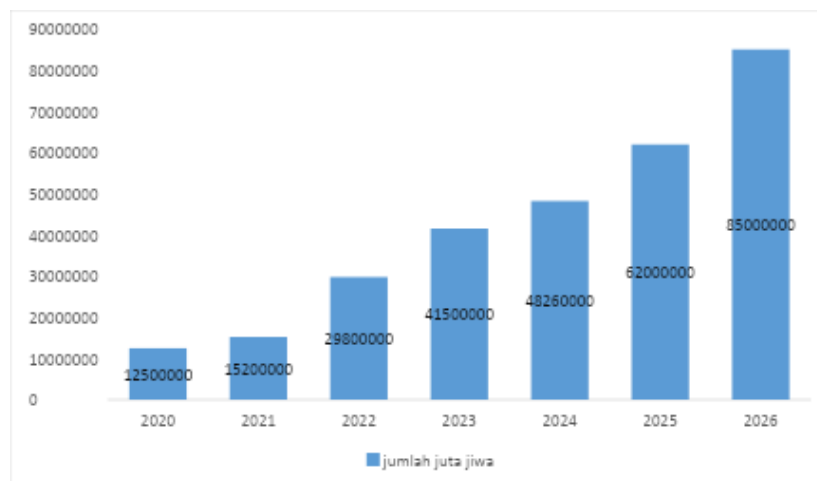
yang melibatkan berbagai segmen pasar, seperti wisata alam yang dipadukan dengan pengalaman budaya serta pendidikan berbasis konservasi.

Meskipun Provinsi Banten memiliki beragam tempat wisata yang sangat bervariasi, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan penilaian dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten menunjukkan adanya masalah serius dalam pola kunjungan wisatawan. Pola arus pengunjung di seluruh provinsi ini menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dan bersifat musiman. Peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti saat libur nasional (Idulfitri dan Natal), liburan sekolah, serta saat pergantian tahun. Pada saat-saat tersebut, layanan dasar seperti antrean masuk, ketersediaan toilet umum, dan tempat parkir sering kali tidak mampu memenuhi permintaan dengan baik, mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan. Sebaliknya, pada hari-hari biasa, tingkat kunjungan bisa melorot sangat tajam ke angka yang sangat rendah. Fluktuasi yang ekstrem ini memberikan dampak negatif yang besar terhadap stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah wisata. Saat kunjungan sepi, pendapatan pedagang kecil, pengurus homestay, pemandu wisata, dan penyedia transportasi lokal sangat menurun, membuat mereka kesulitan untuk menutupi biaya operasional sehari-hari, termasuk kebutuhan logistik, pemeliharaan fasilitas sederhana, dan pembayaran karyawan.

Lebih jauh, pola kunjungan yang bersifat musiman ini membuat pengelolaan serta perawatan fasilitas umum di daerah wisata menjadi tidak optimal. Biaya untuk merawat infrastruktur tetap harus dikeluarkan sepanjang tahun, sementara pendapatan dari sektor pariwisata hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu. Ketidakseimbangan antara biaya tetap dan pendapatan yang fluktuatif ini berpotensi menurunkan mutu layanan publik, seperti kebersihan yang kurang baik, perbaikan infrastruktur yang tertunda, atau terganggunya fungsi sarana umum akibat anggaran yang terbatas pada waktu-waktu sepi. Situasi ini menandakan bahwa sektor pariwisata di Provinsi Banten belum memiliki sistem ketahanan ekonomi yang mandiri, kuat, dan berkelanjutan. Sektor tersebut masih sangat rentan karena bergantung pada faktor eksternal (momen liburan); sehingga apabila terjadi perubahan seperti penyesuaian jadwal libur, perubahan trend perjalanan wisatawan, atau faktor eksternal lainnya, daerah berisiko mengalami guncangan ekonomi yang cepat (Syamjaya, 2020).

Situasi pariwisata di Provinsi Banten diperburuk oleh adanya ketidakselarasan kebijakan yang mencolok antara regulasi ideal dan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan pedoman ketat terkait standarisasi pengelolaan objek wisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Meskipun demikian, saat pedoman tersebut diterapkan pada sejumlah lokasi wisata di Banten, banyak ditemukan penyimpangan serta ketidaksiapan sistemik (Setiono et al., 2021). Ketidaksiapan ini dapat berupa kapasitas sumber daya manusia pengelola yang kurang memadai, lemahnya koordinasi antara instansi terkait, hingga ketidaktersediaan SOP operasional berbasis standar, termasuk standar kebersihan, manajemen sampah, dan manajemen risiko lingkungan.

Isu mendasar yang mempengaruhi destinasi wisata di Banten (seperti wilayah pesisir Anyer-Carita dan tempat wisata di daerah pedalaman seperti Cisolong) berakar dari buruknya kualitas infrastruktur utama, akses jalan yang rusak dan rawan macet, sistem sanitasi umum yang tidak bersih, serta ketiadaan sistem pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan (Safitri et al., 2023). Ketidaksiapan sarana fisik dan kegagalan birokrasi lokal dalam menerapkan standar pelayanan publik ini menyebabkan banyak keluhan dari para wisatawan. Keluhan ini berkaitan tidak hanya dengan kenyamanan tetapi juga aspek keselamatan, ketersediaan informasi, serta respons yang cepat terhadap masalah yang ada, seperti lambannya layanan kebersihan atau penanganan keluhan yang tidak segera diselesaikan. Akibatnya, terjadi penurunan (Waluyati & Setyowati, 2022) yang signifikan dalam tingkat kepuasan serta berkurangnya loyalitas wisatawan. Banyak wisatawan enggan untuk mengunjungi kembali destinasi yang sama karena merasa biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. Dalam jangka panjang, penurunan loyalitas ini bisa berdampak pada turunnya jumlah kunjungan dan semakin memperburuk pola musiman yang ada.



Gambar 1.1 Diagram Batang Data Terkait Jumlah Pengunjung Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2020-2026

Sumber: Data BPS dan Laporan Kunjungan Dinas Pariwisata Prov Banten 2020-2026

Data yang ditampilkan secara grafis dalam grafik pertumbuhan di atas dengan tegas memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Banten. Jumlah wisata domestik (Wisnus) telah mencapai angka antara 48 hingga 62 juta perjalanan setiap tahunnya. Pada waktu-waktu tertentu seperti hari libur, jumlah kunjungan sering mengalami lonjakan yang mendadak dan sulit untuk diantisipasi. Dari sisi ilmu administrasi publik, manajemen strategis, dan ekonomi wilayah, fenomena berskala besar ini sebenarnya mencerminkan kebangkitan pariwisata nasional. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya daya beli masyarakat, kembali beraktivitas pasca-pandemi, serta semakin baiknya akses transportasi antardaerah. Namun, di balik angka pertumbuhan yang tinggi tersebut, terdapat ancaman serius yang berupa fenomena over-tourism pada masa puncak. Pada puncaknya, kapasitas total dapat mencapai sekitar 85 juta orang, sehingga tekanan pada sistem pelayanan di destinasi, termasuk infrastruktur dasar, kebersihan, dan pengelolaan ruang publik, melampaui batas wajar yang seharusnya.

Jika tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat, terukur, dan cepat, kenaikan jumlah wisatawan ini akan menimbulkan dampak negatif yang terus bertambah dan sulit untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Pertama, lingkungan akan tercemar secara serius, seperti permasalahan akumulasi sampah plastik di daerah pesisir, contohnya di pantai-pantai yang ramai dikunjungi. Sampah yang sulit terurai dapat menyumbat saluran

pembuangan, mencemari laut, dan menambah beban biaya bagi pemerintah daerah, karena harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah tersebut. Kedua, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh aktivitas wisata yang tidak terawasi, seperti kaki manusia yang merusak struktur karang atau pembuangan limbah cair dari tempat yang tidak sesuai standar. Ketiga, kualitas hutan pantai menurun, yang berfungsi melindungi dari abrasi; hilangnya vegetasi membuat daerah menjadi lebih rentan terhadap gelombang besar dan erosi. Keempat, terjadi kemacetan parah di jalur logistik publik akibat banyaknya kendaraan wisatawan yang menghalangi akses untuk distribusi barang kebutuhan sehari-hari masyarakat serta mengganggu kendaraan layanan darurat. Krisis ketersediaan air bersih bagi penduduk setempat, terutama di wilayah yang tidak memiliki instalasi pengolahan air yang siap menghadapi lonjakan permintaan musim tertentu.

Oleh karena itu, pembuat kebijakan di Provinsi Banten memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk segera menerapkan prinsip Ekowisata Global sebagai landasan strategi dalam mengurangi dampak bencana lingkungan. Ini berarti bahwa perkembangan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga harus memperhatikan kualitas lingkungan, menjamin bahwa masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi, dan memperhitungkan kapasitas dukung sebagai batasan. Melalui pendekatan ekowisata, hal-hal seperti membatasi jumlah pengunjung di lokasi-lokasi sensitif, mengatur jadwal kunjungan pada waktu tertentu, menerapkan sistem manajemen sampah yang terpadu, dan meningkatkan kemampuan pengawasan lingkungan menjadi sangat penting, bukan sekadar pilihan tambahan.

Kebijakan pengembangan pariwisata harus dirancang dengan matang agar bisa menggabungkan keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi dengan tindakan konservasi yang ketat. Penelitian menunjukkan bahwa model pembangunan pariwisata yang tidak berimbang dan tidak melibatkan semua pihak, di mana kepentingan modal lebih didahulukan daripada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, justru berpotensi menciptakan masalah baru. Hal ini bisa menyebabkan ketidakmerataan pendapatan dan memperlebar kesenjangan sosial di antara masyarakat lokal (Nurhalimah1 & Yanottama2, 2021). Ketika usaha kecil tidak dilaksanakan dalam rantai nilai, keuntungan sering kali terpusat pada aktor tertentu, sementara risiko seperti kenaikan harga tanah,

penggusuran halus, dan perubahan sosial budaya justru ditanggung oleh komunitas yang rentan.

Pemberdayaan komunitas lokal melalui model CBT diakui secara luas sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan struktural di daerah pedesaan, menciptakan peluang kerja baru bagi kaum muda lokal, serta mendukung pencapaian target-target global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan menerapkan kebijakan yang memberikan ruang partisipasi yang besar bagi warga, potensi desa-desa wisata di wilayah pedalaman Banten dapat dijadikan kekuatan ekonomi mandiri yang strategis, memiliki daya tawar yang tinggi, berkarakter unik, serta mampu menghasilkan devisa dari pasar internasional secara berkelanjutan (Sulistyo et al., 2023). Jika demikian, keterlibatan komunitas juga berfungsi sebagai sistem kontrol sosial untuk memastikan bahwa standar layanan tetap sesuai dengan nilai budaya setempat dan daya dukung lingkungan.

Bentuk nyata dari pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini adalah dengan mengoptimalkan dan menggalang komitmen investasi dari sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Provinsi Banten memiliki kawasan industri manufaktur dan pelabuhan yang cukup besar di bagian utara (seperti Cilegon, Serang utara, dan Tangerang). Potensi dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar tersebut harus dapat disalurkan secara efektif melalui koordinasi terpusat dari pemerintah provinsi, agar mendukung pengembangan daerah wisata di bagian selatan (Pandeglang dan Lebak) yang memiliki banyak potensi tetapi kekurangan anggaran. Investasi sosial dari dana CSR dapat dialokasikan secara spesifik untuk mendanai program rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak di tempat wisata, mendirikan fasilitas sanitasi bersih berstandar internasional, melakukan penanaman kembali hutan bakau di pesisir yang mengalami abrasi, serta membiayai program pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi pemandu wisata lokal. Dengan cara ini, program CSR tidak hanya berhenti pada kegiatan simbolis, tetapi menjadi investasi yang membangun kapasitas secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.

Seluruh inovasi dalam kebijakan, model pemberdayaan masyarakat (CBT), dan investasi kemitraan CSR yang telah direncanakan tidak akan dapat berjalan dengan konsisten, aman, dan berkelanjutan jika tidak didukung oleh kepastian hukum. Dalam

sistem administrasi publik di Indonesia, pengesahan kebijakan ke dalam produk hukum formal merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari masalah seperti tumpang tindih wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, sengketa pemanfaatan lahan, dan potensi praktik pungutan liar di objek wisata yang bisa merugikan citra daerah. Oleh karena itu, mempercepat proses legislasi produk hukum formal di tingkat daerah, seperti penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perlindungan dan Pengembangan Desa Wisata, menjadi fondasi yang sangat penting. Perda ini juga bisa mengatur standar minimum tata kelola, mekanisme audit partisipatif, skema pengelolaan pendapatan, serta prosedur untuk menangani keluhan wisatawan dan masyarakat.

Kehadiran Perda Desa Wisata berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan pengakuan resmi kepada komunitas lokal (Pokdarwis) untuk mengelola sumber daya wisata secara mandiri, menarik komitmen dari sektor swasta dalam penyediaan dana CSR dengan cara yang transparan, serta menciptakan jaminan keamanan bagi para pengunjung. Dengan penegakan aturan daerah yang disusun dengan baik, jelas, menyeluruh, dan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah bisa membentuk sebuah sistem pengelolaan pariwisata yang profesional, bertanggung jawab, bebas dari praktik administrasi yang tidak etis, serta memiliki kepatuhan hukum yang tinggi hingga tingkat paling bawah. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, perkembangan desa wisata juga dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur sehingga program tidak mudah tergoda untuk berubah-ubah mengikuti kepentingan sesaat (Elyta Kristiantina & Santoso Haryono, 2021).

Transformasi digital ini diwujudkan dengan menciptakan ekosistem pariwisata cerdas, yang meliputi penyediaan sistem pemesanan tiket elektronik, integrasi saluran pembayaran non-tunai untuk mengurangi kebocoran pendapatan daerah, serta penggunaan dasbor data analitik berbasis web untuk memantau aliran pengunjung secara langsung. Di samping itu, penerapan sistem informasi geospasial dapat membantu dalam memetakan area rawan keramaian, zona konservasi, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana. Untuk pemasaran, metode promosi lama yang menggunakan brosur fisik harus sepenuhnya digantikan dengan kampanye pemasaran digital yang kreatif dengan memanfaatkan algoritma media sosial, pembuatan video interaktif, dan kolaborasi dengan platform penyedia jasa perjalanan daring global. Dengan konten yang menyoroti

pengalaman ekowisata, seperti paket edukasi jelajah mangrove atau tur yang menghormati nilai-nilai lokal, maka akan lebih tepat untuk pasar yang dituju dan kualitas kunjungan dapat terjaga dengan lebih baik. Melalui percepatan teknologi digital yang terintegrasi ini, tata kelola pariwisata di Banten dapat memangkas jalur birokrasi yang panjang, meningkatkan efisiensi operasi secara signifikan, memastikan transparansi keuangan publik, menjangkau pasar internasional secara cepat dan efektif, serta memungkinkan penerapan kebijakan pembatasan pengunjung yang berbasis data saat terjadi peningkatan kunjungan pada musim puncak.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus utama pada analisis isi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penerapan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Studi ini secara rinci membahas dokumen peraturan, naskah kebijakan publik, serta menjelajahi bagaimana penerapan pariwisata berkelanjutan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Sumber informasi dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah yang terindeks, yang diakses melalui platform digital, seperti Google Scholar dan Springer Nature Link. Penulis menggunakan referensi jurnal yang berjumlah 30 jurnal (20 jurnal nasional dan 10 jurnal internasional). Pemilihan literatur ditujukan pada publikasi yang membahas dinamika dalam kebijakan pariwisata, standar pembangunan berkelanjutan, serta analisis yang berkaitan dengan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Hasil dan Pembahasan

Context

Penjelasan tentang sistem integrasi pariwisata yang berkelanjutan yang terlihat dalam Gambar 1. 1 Pariwisata Berkelanjutan Banten terdiri dari empat Aspek strategis yang saling terhubung dan dikoordinasikan dengan teliti, dengan tujuan utama untuk membangun kemandirian ekonomi wilayah yang kokoh melalui penerapan manajemen yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pada pilar pertama, yang fokus

pada kebijakan dan manajemen, sistem ini jelas menetapkan transformasi digital sebagai penggerak utama dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan. Hal ini direalisasikan melalui penerapan sistem perpajakan elektronik yang efisien untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan transparansi anggaran, sistem tiket elektronik yang mempermudah akses dan pengelolaan pengunjung sekaligus mengumpulkan data penting, serta analisis data berbasis web yang canggih untuk memantau kinerja destinasi secara langsung dan mendalam. Data yang diperoleh secara real-time ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti, memastikan setiap keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini, dan didukung oleh standar operasional yang ketat. Standarisasi ini mencakup aspek-aspek penting seperti kebersihan fasilitas, keamanan untuk wisatawan, dan profesionalisme pelayanan yang tinggi dari semua pihak terkait. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Capucho et al., 2025) tentang pentingnya transformasi digital untuk membangun ketahanan destinasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan, serta (Soka et al., 2025) yang menekankan peran penting transparansi fiskal melalui sistem perpajakan elektronik dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.



Gambar 2.1 Pariwisata Berkelanjutan Integrasi Kebijakan dan Pembangunan
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Aspek kedua dari sistem integrasi ini, yang berfokus pada ekonomi dan dampaknya, menekankan usaha menyeluruh untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara signifikan meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal. Strategi ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh rantai pasokan pariwisata, melibatkan secara aktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal untuk produk dan layanan, mempromosikan produk kreatif daerah yang unik, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Sistem ini juga mendorong diversifikasi ke sektor jasa yang bernilai tambah tinggi, seperti pengembangan ekonomi biru yang memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan, termasuk pariwisata bahari dan budidaya perairan yang ramah lingkungan. Langkah-langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang solid dan fleksibel dalam menghadapi tantangan mobilitas yang tinggi pasca-pandemi, serta secara efektif mengurangi kebocoran fiskal melalui sistem yang terintegrasi dan akuntabel. Analisis oleh (Tohopi et al., 2025) sangat mendukung pendekatan ini, dengan menunjukkan adanya dampak pengganda ekonomi yang signifikan dari sektor pariwisata jika dikelola secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, aspek integrasi SDGs dan lingkungan menekankan prinsip bahwa eksploitasi ekonomi pariwisata harus selalu dibatasi oleh daya dukung lingkungan yang ketat untuk menjaga kelestarian destinasi dalam jangka panjang. Pilar ini menekankan pentingnya penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang efisien, perlindungan keanekaragaman hayati lokal, serta penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Ini memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak merusak ekosistem alami dan warisan budaya yang menjadi daya tarik utama, sehingga keberlanjutan lingkungan dan sosial dapat terus terjaga.

Terakhir, aspek kelembagaan dan keterlibatan memastikan bahwa setiap rencana strategis didukung oleh pemberdayaan masyarakat setempat dan kepastian hukum. Melalui pendekatan Pariwisata Berbasis Masyarakat, penduduk di desa wisata diberikan hak dan otoritas untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, yang selanjutnya diperkuat melalui kerjasama Pentahelix antara pemerintah, dunia akademik, sektor swasta lewat dana CSR, media, dan masyarakat. Semua upaya kolaborasi ini diikat oleh landasan

hukum berupa Peraturan Daerah tentang Desa Wisata untuk menjamin pengelolaan yang profesional, transparan, serta berkelanjutan, mengacu pada prinsip tata kelola kolaboratif yang diajukan oleh (Setiono et al., 2021).

Input

Strategi diversifikasi produk dan resiliensi wisata lokal yang dipaparkan dalam Gambar 2.2 Strategi Diversifikasi Produk & Resiliensi Wisata Lokal merupakan sebuah kerangka kerja komprehensif yang multidimensional, dirancang secara khusus untuk memperkuat sektor pariwisata daerah agar lebih tahan banting menghadapi berbagai tantangan. Fokus utamanya berpusat pada penciptaan nilai tambah lokal yang berkelanjutan, yang berarti mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki komunitas setempat. Selain itu, kerangka kerja ini menitikberatkan pada pengembangan pasar wisata tematik yang spesifik untuk menarik segmen wisatawan yang beragam, menawarkan pengalaman budaya otentik yang mendalam dan bermakna, serta secara konsisten mendorong inovasi pada produk dan layanan agar selalu relevan dan kompetitif di pasar global yang dinamis. Tujuan utamanya adalah memastikan pertumbuhan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.



Gambar 2.2 Pariwisata Berkelanjutan Integrasi Kebijakan dan Pembangunan
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Aspek 1, peningkatan rantai pasok lokal, pada dasarnya berorientasi pada penguatan keseluruhan ekosistem produksi di sekitarnya destinasi wisata, dari awal hingga akhir proses. Hal ini dilakukan dengan menerapkan model penawaran komunitas

yang terintegrasi yang mendorong kerja sama di antara berbagai pihak lokal serta upaya yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah dengan memproses produk secara lokal. Singkatnya, sumber daya yang ada di daerah digunakan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi di tempat asalnya, bukan hanya dijadikan bahan mentah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasok produk dan jasa yang mendukung sektor pariwisata mampu mendorong ekonomi masyarakat lokal dengan adil, memberikan keuntungan langsung kepada petani, pengrajin, dan pelaku usaha kecil. Hal ini sejalan dengan temuan dari studi (Pan et al., 2025) yang menunjukkan pentingnya efek pengganda yang signifikan dari pengembangan rantai pasok lokal yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek 2, kategori produk dan unggulan, mencakup proses pengembangan yang seksama dan promosi yang efisien terhadap berbagai jenis produk pariwisata. Diversifikasi ini direncanakan secara strategis untuk menarik beragam segmen pasar dengan preferensi yang bervariasi. Produk-produk tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yang saling melengkapi: pertama, wisata budaya dan sejarah yang memberikan pengalaman mendalam mengenai tradisi, kebiasaan, dan situs-situs bersejarah; kedua, ekowisata dan petualangan alam yang menekankan pengalaman berbasis alam yang bertanggung jawab dan menantang; dan ketiga, wisata kuliner serta kerajinan daerah yang memungkinkan pengunjung menikmati cita rasa lokal dan memperoleh produk unik yang dibuat dengan tangan. Diversifikasi produk yang menyeluruh ini merupakan strategi penting untuk mengurangi risiko, memastikan bahwa destinasi tidak hanya bergantung pada satu tipe atraksi yang bisa membuatnya lebih rentan terhadap fluktuasi pasar atau kejadian yang tidak terduga. Pendekatan ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam penelitian (Waluyati & Setyowati, 2022) mengenai betapa pentingnya diversifikasi produk untuk terus meningkatkan daya tarik dan relevansi destinasi di tengah persaingan industri pariwisata global yang semakin ketat.

Aspek 3, taktik pemasaran dan distribusi, dirancang untuk mengintegrasikan dengan baik metode pemasaran digital yang modern dengan pembangunan citra destinasi yang kuat dan khas. Tujuannya adalah untuk menjangkau lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional, melalui pesan yang konsisten dan menarik. Selain itu, pilar ini juga mencakup upaya yang proaktif untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan

berbagai agen perjalanan, baik yang konvensional maupun daring, serta platform pemesanan online terkemuka, guna memperluas jangkauan distribusi dan mempermudah akses bagi wisatawan potensial. Selanjutnya, pilar ini juga menekankan penggunaan analitis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data ini berfungsi sebagai alat penting untuk memahami pola wisata musiman, mengidentifikasi tren kunjungan, serta memprediksi tantangan dan peluang yang muncul di waktu tertentu, sehingga memungkinkan pengembangan strategi yang lebih tepat dan adaptif.

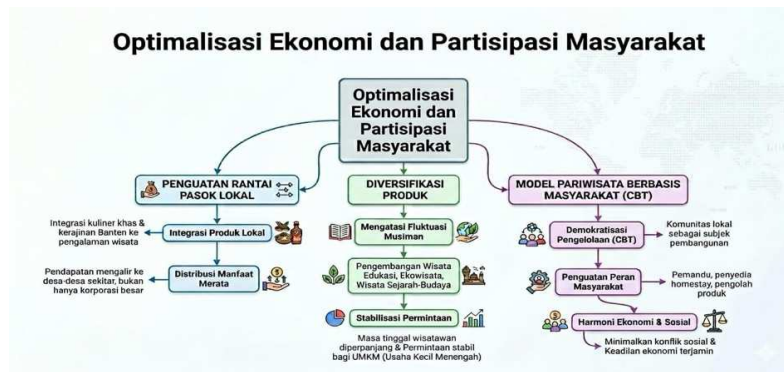
Aspek 4, yang berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan, adalah elemen penting untuk daya tahan sebuah destinasi. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pola musiman melalui variasi sumber pendapatan, serta memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, aspek ini berfungsi untuk menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan lewat perlindungan ekosistem serta komitmen yang solid terhadap jaminan mutu dan pelaksanaan standar layanan bagi setiap pengunjung. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola kolaboratif dari (Setiono et al., 2021) yang menekankan bahwa ketahanan sebuah destinasi sangat tergantung pada partisipasi aktif komunitas lokal dalam pengelolaan keberlanjutan lingkungan dan mutu layanan.

Secara keseluruhan, semua Aspek ini bertujuan untuk membangun destinasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, menjaga daya saing di tengah kemajuan teknologi, serta memberikan dampak ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Kesatuan dari berbagai strategi ini mencerminkan pentingnya manajemen destinasi yang lincah, responsif, dan berbasis kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai kemandirian ekonomi wilayah.

Process

Model optimalisasi ekonomi dan partisipasi publik yang ditampilkan secara jelas dalam Gambar 2. 3 ini dirancang sebagai mekanisme strategis yang menyeluruh. Tujuan dari model ini adalah untuk memperkuat secara fundamental struktur serta keberlanjutan sektor pariwisata di suatu wilayah, terutama melalui pendekatan yang holistik dengan melibatkan pelaksanaan tiga Aspek utama. Aspek aspek ini saling terkait dan dirancang agar dapat bekerja sama secara optimal, sehingga membentuk dasar pariwisata yang lebih

tangguh dan inklusif. Penjelasan terperinci serta konteks masing-masing aspek berikut akan diuraikan lebih lanjut.



Gambar 2.3 Pariwisata Berkelanjutan Integrasi Kebijakan dan Pembangunan
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Aspek pertama dalam kerangka ini adalah penguatan rantai pasokan lokal secara menyeluruh, yang merupakan inisiatif penting yang berfokus pada integrasi mendalam produk-produk unggulan daerah. Ini meliputi berbagai kuliner khas Banten yang asli dan kerajinan tangan lokal yang unik, yang terintegrasi dalam setiap aspek pengalaman wisata yang diberikan kepada pengunjung. Dengan strategi yang terencana ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata tidak hanya menguntungkan perusahaan besar atau investor luar, tetapi juga dapat didistribusikan dengan adil. Manfaat tersebut ditujukan langsung kepada komunitas di desa-desa sekitar destinasi wisata, sehingga ekonomi lokal dapat diberdayakan secara nyata. Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan temuan dan rekomendasi dari penelitian (Di & Sumedang, 2024), yang menegaskan bahwa penguatan rantai pasokan lokal adalah instrumen yang sangat efektif dan penting. Hal ini terbukti dapat memaksimalkan efek pengganda yang dihasilkan dari sektor pariwisata, dengan demikian berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal yang menjadi aspek bagi keberlanjutan destinasi.

Aspek kedua secara esensial berfokus pada strategi diversifikasi produk dan pengalaman wisata, yang dilihat sebagai solusi inovatif dan taktis untuk mengatasi isu fluktuasi musiman yang sering menjadi permasalahan bagi banyak destinasi wisata. Fluktuasi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha lokal. Dengan aktif mengembangkan berbagai bentuk wisata seperti edukasi

yang memperluas wawasan, ekowisata yang mendukung konservasi alam dan budaya setempat, serta wisata sejarah-budaya yang mengeksplorasi warisan dan tradisi daerah, destinasi mampu mencapai stabilisasi permintaan yang lebih signifikan. Hal ini tidak hanya memperpanjang masa tinggal wisatawan di luar musim puncak tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil, yang pada akhirnya memberikan jaminan pasar serta prospek ekonomi yang lebih pasti bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Strategi diversifikasi yang cermat ini didukung kuat oleh penelitian mendalam dari (Ilmiah & Sosiopolitika, 2020), yang secara tegas menyatakan bahwa diversifikasi yang berlandaskan pemanfaatan potensi lokal adalah cara yang paling efektif dan adaptif dalam menjaga keberlanjutan dan daya tahan suatu destinasi pariwisata di tengah ketidakpastian dan perubahan pasar global yang sering kali tidak terduga.

Aspek ketiga yang sangat penting adalah penerapan dan penguatan Model Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) secara berkelanjutan. Model ini secara mendasar menekankan prinsip demokratisasi dalam manajemen destinasi wisata, yang berarti komunitas lokal harus diakui sebagai subjek yang berperan aktif dan penggerak dalam seluruh proses pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah mereka. Dalam pelaksanaan model ini, partisipasi masyarakat lokal ditingkatkan secara nyata dan strategis melalui berbagai kapasitas. Mereka diberikan wewenang untuk menjadi pemandu wisata yang terlatih, penyedia layanan penginapan seperti homestay yang otentik, serta pengolah dan pemasar produk turistik khas daerah. Integrasi model ini secara menyeluruh memastikan bahwa penduduk lokal memiliki kepemilikan dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya pariwisata mereka, sekaligus mendorong distribusi manfaat yang lebih adil.

Secara keseluruhan, penggabungan ketiga pilar dalam gambaran 2.3 ini menunjukkan perlunya transformasi dalam tata kelola yang tidak hanya berfokus pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada dampak ekonomi yang mendalam dan kualitas hubungan sosial di tingkat komunitas. Dengan menerapkan model ini, destinasi di Provinsi Banten dapat memperkuat ketahanan ekonominya sambil membangun hubungan komunitas sebagai pilar utama pembangunan daerah secara merata.

Product

Analisis komprehensif Gambar 2.4 tentang Konservasi Lingkungan dalam Koridor SDGs Banten ini memberikan wawasan mendalam mengenai suatu kerangka strategis yang inovatif dan terencana. Kerangka ini secara khusus dibuat untuk menggabungkan berbagai elemen ekologis penting dalam pengembangan produk pariwisata di wilayah Banten, sehingga menciptakan respons proaktif terhadap tantangan keberlanjutan yang dihadapi oleh destinasi wisata masa kini. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, namun juga mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai konservasi dapat menjadi daya tarik utama dan keunggulan bersaing bagi pariwisata di Banten, yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan ekosistem serta keuntungan ekonomi jangka panjang.



Gambar 2.4 Pariwisata Berkelanjutan Integrasi Kebijakan dan Pembangunan
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Pilar pertama dari kerangka kerja ini adalah pengelolaan kapasitas dukung, yang merupakan konsep fundamental dalam mengontrol dan mengatur tekanan yang dihasilkan oleh aktivitas pariwisata pada ekosistem yang cenderung rapuh dan rentan. Strategi utama yang diterapkan dalam pilar ini mencakup pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi-lokasi yang sensitif atau memiliki nilai konservasi tinggi, bertujuan untuk menghindari kerusakan fisik dan ekologis. Selain itu, penerapan zonasi yang ketat dilakukan untuk memisahkan kegiatan manusia dari kawasan perlindungan secara jelas, guna memastikan habitat alami tetap terjaga. Berbagai langkah pencegahan juga dikembangkan guna secara efektif menghindari penurunan kualitas ekosistem yang

disebabkan oleh kepadatan pengunjung yang berlebihan, seperti penentuan jalur khusus, manajemen limbah, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pendekatan pengelolaan ini sangat penting dan menjadi dasar untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena pariwisata yang berlebihan, situasi di mana jumlah turis melebihi kapasitas ekologis dan sosial destinasi. Seperti yang ditekankan dalam studi yang dilakukan oleh (Liu et al., 2025), penerapan pengelolaan kapasitas dukung yang ketat bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan syarat mutlak yang perlu dipenuhi untuk menjaga secara konsisten kualitas lingkungan dan integritas ekologis dari destinasi wisata yang mengedepankan keindahan alam.

Pilar kedua bertujuan untuk mengintegrasikan semua aspek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air) dan SDG 15 (Kehidupan di Darat). Integrasi ini secara strategis menempatkan sektor pariwisata Banten dalam konteks global yang lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Fokus dari pilar ini beragam dan mencakup pengelolaan limbah yang holistik dan menyeluruh, dari pengurangan, daur ulang, hingga penanganan air limbah, untuk menghindari pencemaran baik di darat maupun di laut. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman hayati, yang menjadi salah satu aset penting pariwisata Banten, diutamakan melalui program perlindungan spesies yang terancam punah, restorasi habitat, dan pengelolaan kawasan konservasi. Tidak kalah pentingnya, edukasi bagi wisatawan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya menerapkan praktik pariwisata yang ramah lingkungan, seperti larangan merusak terumbu karang atau membuang sampah sembarangan di hutan bakau. Pelaksanaan pilar ini sejalan dan mendapatkan dukungan kuat dari temuan (Pramana et al., 2022), yang dengan tegas menyatakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan memiliki tanggung jawab untuk aktif berkontribusi dalam melindungi ekosistem darat dan laut. Selain itu, perlindungan terhadap ekosistem ini tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian penting dari daya tarik dan nilai jual produk pariwisata, menarik minat wisatawan yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Pilar ketiga dalam struktur ini berfokus pada sinergi model Pentahelix serta penguatan kepastian hukum, menekankan bahwa keberlanjutan produk wisata tidak

hanya tergantung pada aspek teknis dan operasional lingkungan, tetapi juga memerlukan dasar yang kuat dari penguatan kelembagaan. Sinergi Pentahelix yang mencakup lima elemen utama akademisi, sektor bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, dan media/masyarakat sipil merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Kerjasama yang erat di antara para aktor ini memungkinkan penciptaan kebijakan yang inklusif, inovasi produk wisata yang ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat setempat, serta promosi pariwisata yang bertanggung jawab. Selain itu, kepastian hukum yang jelas dan konsisten sangat penting untuk menyediakan dasar regulasi yang kokoh, menarik investasi berkelanjutan, serta memastikan semua pihak mematuhi standar sosial dan lingkungan. Aspek ini menjaga agar langkah konservasi dan pengembangan pariwisata memiliki dukungan hukum yang solid, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek, serta melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan.

Secara keseluruhan, integrasi ketiga pilar dalam Gambar 2.4 menegaskan bahwa dalam konteks Banten, konservasi lingkungan merupakan elemen utama dari "produk" wisata itu sendiri. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan ekosistem, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing destinasi melalui citra yang ramah lingkungan, etis, dan dikelola dengan baik melalui kolaborasi antar sektor yang kuat. Kesatuan dimensi ini mencerminkan manajemen destinasi yang dinamis dan berfokus pada masa depan, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Dachi et al., 2024) tentang pentingnya integrasi kebijakan ekonomi dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata daerah.

Simpulan

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Banten menuntut transformasi paradigma dari model tradisional yang bersifat sentralistik dan musiman menuju sistem pariwisata berkelanjutan yang lebih integratif dan kolaboratif. Keberhasilan tata kelola destinasi ini bergantung pada sinergi antar-pemangku kepentingan dalam model Pentahelix serta penguatan model Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) yang menempatkan penduduk lokal sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Selain itu, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam melakukan

diversifikasi produk wisata untuk mengatasi fluktuasi kunjungan musiman, dibarengi dengan percepatan transformasi digital yang transparan dan berbasis data guna meningkatkan efisiensi fiskal. Penting pula untuk menegaskan bahwa setiap upaya pengembangan pariwisata harus dibatasi oleh daya dukung lingkungan (carrying capacity) dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) agar aset alam dan budaya tetap terjaga sebagai daya tarik utama. Terakhir, seluruh inovasi ini memerlukan fondasi hukum yang kuat, seperti Peraturan Daerah, untuk memberikan kepastian bagi komunitas lokal, menarik investasi yang bertanggung jawab, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan dampak sosial yang inklusif dan merata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Capucho, J., Leitão, J., & Alves, H. (2025). Mapping and linking well-being, tourism economics, sustainable tourism and sustainable development: An integrative systematisation of the literature and bibliometric analysis. *Discover Sustainability*, 6(1), Article 291. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01122-y>
- Dachi, Y. L., Siagian, N., & Rajagukguk, J. (2024). Strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi pariwisata pada Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 4844–4858. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9946>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan.
- Kristiantina, D. E., Sarwono, & Haryono, B. S. (2013). Analisis kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 15–21.
- Liu, S., Islam, H., Ghosh, T., Ali, M. S. E., & Afrin, K. H. (2025). Exploring the nexus between economic growth and tourism demand: The role of sustainable development goals. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, Article 441. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04733-y>
- Nurhalimah, Z., & Yanottama, S. I. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah: Studi pada destinasi wisata Balong Kawuk Desa Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 140–147. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v17i02.1208>
- Pan, Z., Luo, Y., Wang, Y., Ji, J., & Lai, B. (2025). Coupling coordination and driving mechanism between tourism development, ecological conservation and digital

- economy: Insights from Chinese 278 cities. *Scientific Reports*, 15, Article 37445. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-21169-1>
- Pramana, A., Zamaya, Y., Ardian, & Rizhan, A. (2022). Implementasi kebijakan pariwisata pada desa wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 179–184.
- Safitri, R., Samin, R., & Akhyary, E. (2023). Pembangunan pariwisata berkelanjutan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang: Studi Tanjung Siambang. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 62–71. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1328>
- Setiono, S. T., Afrizal, T., Supriyono, E., Wendra, R. M., & Nurfitriani, A. (2021). Implementasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kota Semarang. *Perspektif*, 10(1), 26–35. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3943>
- Soka, A., Suprojo, A., & Purwatiningsih, A. (2025). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 98–105.
- Sulistyo, A., Novianti, F., Yudiandri, T. E., Rahmawati, A., Suharyono, E., & Kristianto, D. A. (2023). Implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan berbasis masyarakat: Studi pada Desa Wisata Poncokusumo. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(2), 95–107. <https://doi.org/10.37535/104003220233>
- Syamjaya, S. M. (2019). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 2(2), 22–28. <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.269>
- Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). Implementasi community-based tourism sebagai strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 159–171. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>
- Waluyati, H. O., & Setyowati, K. (2022). Perencanaan strategis Kelurahan Kenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui desa wisata kreatif. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 34–45. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63272>